

# DRIYARHARA

Th. XXXI no. 1 / 2010

JURNAL FILSAFAT



## ALAM PIKIRAN INDONESIA

ISSN: 0216-0243

JURNAL FILSAFAT

DRIYARHARA

ALAM PIKIRAN INDOENSIA

# DAFTAR ISI JURNAL DRIYARKARA

## Alam Pikir Indonesia

### **Tenggelamnya Pancasila**

Gerardus Hadian Panamokta ..... 3

### **Mencari Eksistensi Manusia: Sebuah Tanggapan Driyarkara terhadap “Kritik terhadap Publik” Kierkegaard**

L. Kristianto Nugraha ..... 13

### **Sebuah Pemahaman Mengenai Etika Jawa**

Clarimundo Castelo Gusmao ..... 27

### **Prinsip Kerukunan dan Prinsip Hormat dalam Etika Jawa**

Mateus Lesnanto ..... 35

### **Menerawang Falsafah Jawa**

..... 43

### **Surat dari Rawasari**

Binhad Nurrohmat ..... 61

### **Politik Keselarasan: Membaca Ulang “Etika Jawa”**

Trisno S. Sutanto ..... 65

## Artikel Lepas

### **Di Hadapan ‘Wanita’ (?): Sebuah Pemikiran Nietzsche mengenai Kebenaran**

Nikolas Kristiyanto ..... 73

### **Zarathustra Berkata, “Saya Orang Gila.”**

Leslie Joseph Bingkasan ..... 81

# TENGGELAMNYA PANCASILA

Gerardus Hadian Panamokta\*

**Abstrak:** Menalar Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia pada masa kini tenggelam di antara pemikiran fundamentalisme agama dan pemikiran kapitalisme, sekularisasi, individualisme, narsisisme dan hedonisme. Driyarkara, seorang filsuf yang terlibat penuh dengan perjuangan bangsanya, menawarkan pemikiran akan Pancasila yang amat terkait dengan Religi dan ide-ide sekuler. Berangkat dari eksistensi manusia, Driyarkara melihat hubungan cinta kasih yang menyatukan sila-sila (perikemanusiaan, keadilan sosial, demokrasi, kebangsaan dan ketuhanan). Mengakar kembali pada Pancasila berarti kembali lagi pada eksistensi manusia di mana proses ini merupakan proses terus menerus yang tak kenal henti.

**Kata-kata Kunci:** Pancasila, Religi, fundamentalisme agama, kapitalisme, narsisisme, individualisme, hedonisme.

## PENGANTAR

Pancasila sebagai dasar negara pada masa perumusannya mengalami tarik ulur antara gempuran gerakan pendukung politik keagamaan dan politik nasionalis. Sekarang, Pancasila yang namanya tenggelam di telinga masyarakat kontemporer Indonesia, kembali lagi menghadapi gempuran serupa. Kali ini gempuran diwakili oleh gerakan fundamentalisme agama dan di sisi lain gerakan non-agama semacam kapitalisme, sekularisasi, individualisme, narsisme dan hedonisme, pertemuan dua kubu yang menyebabkan manusia Indonesia lupa akan Ada-nya yakni Pancasila. Dasar negara sekaligus dasar hidup dan basis eksistensi manusia Indonesia semakin jauh dari lubuk hati identitas dirinya.

Driyarkara, pemikir yang terlibat dengan perjuangan bangsanya, dapat menjadi acuan kita untuk berpikir kembali secara kritis dan reflektif. Fenomena yang terjadi di Nusantara akhir-akhir ini saya tangkap memiliki kemiripan dan keserupaan dengan masa Driyarkara berjuang. Jika pada masanya status Pancasila diperdebatkan antara kaum religi dan kaum nasionalis maka kali ini Pancasila seolah lenyap lantaran daya pikat fundamentalisme dan arus sekularisasi dengan ciri individualisme, kapitalisme, narsisisme dan hedonisme yang kuat. Berangkat dari pertentangan tersebut, tulisan ini saya angkat sebagai upaya menghadirkan kembali semangat kritis yang diusung oleh Driyarkara.

Pertama kita hendaknya mengetahui terlebih dahulu latar belakang pemikiran Driyarkara akan Pancasila. Motivasi dan peristiwa apa yang mendorongnya untuk merefleksikan Pancasila menjadi pertanyaan yang ingin kita jawab. Kedua, saya masuk lebih dalam pada pembahasan filsuf Indonesia ini pada kaitannya antara Pancasila dan Religi. Dua hal yang dipertentangkan dalam alam pemikiran Indonesia zaman itu dan saat ini berkembang lagi sebagai isu yang kurang lebih sama. Ketiga, saya meminjam pemikiran Driyarkara untuk membedah fundamentalisme agama dan gerakan sekular yang merebak di masyarakat dewasa ini. Keempat, saya mengambil beberapa saran Driyarkara untuk “Kembali ke Pancasila”.

## LATAR BELAKANG

Ada dua forum ilmiah yang menjadi titik dorong Driyarkara untuk menulis tentang Pancasila: *pertama*, Seminar Pancasila di Yogyakarta tertanggal 17 Februari 1959, dan *kedua*, Simposium “Kebangkitan Angkatan 66” yang diselenggarakan di aula Universitas Indonesia, Jakarta 6 Mei 1966. Kedua acara tersebut berbeda satu sama yang lain dan Driyarkara menjadi narasumber bagi kedua forum ilmiah tersebut.

Pada Seminar Pancasila, Driyarkara berada pada periode Dewan Konstituante melaksanakan sidang untuk menyusun Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Dalam proses tersebut dewan terpecah-pecah menjadi tiga kelompok yang mengusung pandangannya masing-masing. Ketiganya bertentangan satu dengan yang lain. Kelompok pertama mengusung ide nasionalis. Sedangkan kelompok kedua dan ketiga memiliki ide-ide agama dan sekuler. Tulisan Driyarkara yang berjudul “Pancasila dan Religi” menjadi sebuah penjelasan fundamental yang dapat dipertanggungjawabkan. Pemikirannya menjadi mediator bagi ketiga kelompok tersebut untuk melihat secara mendalam keterkaitan antara Pancasila dengan Religi.

Di momen yang lain yakni berselang 7 tahun pasca seminar di atas, Driyarkara menempatkan pandangannya untuk menanggapi kejadian monumental yang terjadi di Indonesia. Pada tahun 1966 pasca G30S, Driyarkara mengajak forum untuk menalar kembali Pancasila. “Kebangkitan Angkatan 66” menjadi ajang di mana Driyarkara menyinggung adanya penyelewengan Pancasila. Driyarkara melihat penyelewengan itu ada pada ideologi komunis yang dimasukkan ke dalam dasar negara Indonesia.

## PANCASILA DAN RELIGI

Pertanyaan mendasar yang coba dijawab Driyarkara adalah bagaimanakah hubungan Pancasila dan Religi. Pada akhirnya Driyarkara mampu membuktikan secara filosofis betapa terkaitnya kedua hal tersebut. Tidak ada pertentangan di antara keduanya. Justru relasi Pancasila dan Religi menjadi dapat

dipertanggungjawabkan dan dituntut untuk diimplementasikan secara konkret dalam sidang Dewan Konstituante 1959 itu.

### a. Peneropongan Filosofis Pancasila

Perlu dicermati dari tulisan Driyarkara ini bagaimana ia menyusun pandangan filosofisnya yang logis dan runtut. Patokan pertama yang ia gunakan untuk menggali lebih dalam makna Pancasila adalah *eksistensi manusia* itu sendiri. Dari gejala keseharian manusia, ia memulai dan mengembangkan pemikirannya hingga ke tataran yang lebih luas sifatnya. Siapa itu manusia menjadi pertanyaan awal peneropongan filosofisnya. Kemudian dengan bergerak lebih dalam ia menggali kesatuan manusia dengan alam jasmani yakni dunia itu sendiri. Ada proses dialektis di sana yakni kejasmanian manusia dengan kerohaniannya. Karena bersatu dengan alam, manusia itu pun memiliki kesatuan dengan Yang Lain. Di mata Driyarkara kesatuan ini dilihatnya dalam *hubungan cinta kasih*. Secara singkat pijakan awal Driyarkara dalam meneropong dasar negara tak lain melalui gejala-gejala eksistensi manusia itu sendiri.

Berangkat dari pijakannya di atas maka Driyarkara mengusung sebuah tesis, yakni *Cinta Kasih sebagai Pemersatu Sila-Sila*. Karena titik tolaknya adalah manusia, maka ia memulai pemaparannya dari perikemanusiaan, keadilan sosial, demokrasi atau kerakyatan, kebangsaan, dan terakhir ketuhanan.<sup>1</sup> Bukan tanpa alasan Driyarkara di sini menggunakan urutan seperti itu. Tentunya urutan ini dapat dipandang sebagai konsekuensi logis titik pijak filsafat eksistensi yang diusungnya. Di lain pihak, ini juga menjadi usaha Driyarkara untuk pada akhirnya menunjuk sebuah *eka sila* dari Pancasila tersebut yakni *cinta kasih kepada Tuhan*.

Untuk memahami secara lebih jelas bagaimana Driyarkara menjelaskan runtutan logis filosofis ini, saya akan mengutipkannya:

- I. Aku manusia mengakui bahwa adaku itu merupakan Ada-Bersama-Dengan-Cinta-Kasih (*liebendes Miteinandersein*). Jadi, adaku harus aku jalankan sebagai cinta kasih pula. Cinta kasih dalam kesatuanku dengan sesama manusia, jika dipandang pada umumnya disebut *Perikemanusiaan*.
- II. *Perikemanusiaan* itu harus kujalani dalam bersama-sama menciptakan, memiliki, dan menggunakan barang-barang dunia yang berguna sebagai syarat-syarat, alat-alat, dan perlengkapan hidup. Penjelmaan Perikemanusiaan dalam sektor ini disebut *Keadilan Sosial*.
- III. *Perikemanusiaan* harus kulaksanakan juga dalam memasyarakat. Aku manusia niscaya memasyarakat. Memasyarakat berarti mengadakan kesatuan-karya. Agar kesatuan-karya itu betul-betul merupakan pelaksanaan dari Perikemanusiaan, setiap anggota harus dihormati dan diterima sebagai pribadi yang sama haknya. Cara melaksanakan Perikemanusiaan dalam sektor ini (ialah pembentukan kesatuan-karya) kita sebut *Demokrasi*. Cara ini harus dijalankan baik dalam masyarakat-kecil (kooperasi, dan sebagainya) maupun dalam masyarakat besar.
- IV. *Perikemanusiaan* harus juga kulaksanakan dalam hubunganku dengan kesatuan,

yang dengan proses lambat laun ditimbulkan oleh sejarah, keadaan tempat, keturunan, kebudayaan, peradaban bersama, dan faktor yang lain. Kesatuan itu ikut serta menentukan dan membentuk diriku sebagai manusia yang konkret dengan perasaannya, semangatnya, pikirannya, dan sebagainya. Ada bersama pada konkretnya berupa hidup dalam kesatuan itu. Jadi, hidupku dalam kesatuan itu harus merupakan pelaksanaan dari Perikemanusiaan. Kesatuan yang besar itu, tempat aku pertama harus melaksanakan Perikemanusiaan, disebut *Kebangsaan*.

- V. Aku mengakui bahwa adaku itu ada bersama, serba terhubung, serba tersokong, serba tergantung. Jadi, adaku itu tidak sempurna, tidak atas kekuatan sendiri. Semua hal yang ada dengan terbatas, justru karena terbatasnya (sama dengan aku) tidak mungkin merupakan sumber adaku, tidak mungkin memberi keterangan yang terakhir dari adaku. Yang dapat merupakan sumber adaku pada akhirnya hanyalah Ada Yang Mutlak, Sang Maha-Ada. Sang Maha-Ada itu bukanlah sesuatu, melainkan Pribadi yang Mahasempurna. *Itulah Tuhan Yang Maha Esa*.

Adaku yang berupa cinta kasih itu sebetulnya adalah cinta kasih kepada Sang Maha-Cinta-Kasih, Sang Maha-Penyayang. Dalam pikiran ini aku menemukan dasar dari adaku; jadi, dasar dari semua perbuatanku; jadi, dasar dari pelaksanaan Perikemanusiaan, Keadilan Sosial, dan lain-lain.

Dengan demikian, jelas bagaimana Driyarkara merumuskan dalil-dalil filsafat Pancasila dengan rumusan di atas.

## b. Religi

Selanjutnya Driyarkara masuk ke dalam telaah *Religi*. Bagi Driyarkara religi merupakan sebuah tuntutan total dan kodrat bagi manusia itu sendiri. Ia memulai penjelasannya ini dengan mengungkapkan pengertian religi. Dalam religi (Latin: *re-liga-re* yang berarti mengikat, *religio* berarti ikatan atau pengikatan) manusia mengikat dirinya pada Tuhan atau manusia menerima ikatannya yang menjadi sumber kebahagiaannya. Akhirnya Driyarkara menyimpulkan Religi sebagai *penyerahan diri* kepada Tuhan dalam keyakinan bahwa manusia itu tergantung pada Tuhan. Manusia yakin bahwa Tuhan merupakan *keselamatan* sejati dari manusia. Keterbatasan kekuatan manusia memungkinkannya untuk memperoleh keselamatan tersebut. Dengan menyerahkan dirinya, manusia memperoleh keselamatan. Bahkan manusia, bila sudah melalui tahap pembersihan lebih lanjut, tidak mengutamakan keselamatan itu sebagai alasan pengikatan dirinya pada Tuhan. Manusia tersebut terdorong oleh keyakinan bahwa hidupnya harus merupakan keluhuran dan cahaya Tuhan. Persis inilah *kebahagiaan* manusia.

Kita kembali lagi ke permasalahan awal Driyarkara yakni relasi Pancasila dan Religi. Bagi Driyarkara Pancasila merupakan *pendorong ke arah Religi* itu sendiri. Maksudnya Pancasila sebagai eka sila yaitu cinta kasih kepada Tuhan. Dengan

demikian, Pancasila menunjuk manusia sebagai potensi ke Religi. Oleh sebab itu, tidak mungkin bisa Pancasila bertentangan dengan Religi. Sebaliknya Pancasila merupakan dukungan bagi Religi.

Kemudian Driyarkara menunjukkan pertemuan antara Pancasila dan Religi di bagian akhir tulisannya. Rupanya ada *dua macam eka sila* (Pancasila itu sendiri) yang dimaknai oleh Driyarkara: *pertama*, Pancasila sebagai *rumusan filsafat/Weltanschauung* dan *kedua*, Pancasila sebagai *dasar negara*. Pancasila dalam artian pertama lebih umum sifatnya. Sedangkan dalam makna yang kedua dalam artian khusus. Driyarkara menjelaskan bahwa apa yang kita sebut negara itu pada hakikatnya adalah suatu karya. Tak heran bila Driyarkara menggunakan istilah *menegara*. Konsekuensinya menjadi jelas bahwa ada makna berbeda dalam butir-butirnya. Perikemanusiaan lebih berarti internasionalisme, keadilan sosial dimaknai seperti yang harus dijelmakan oleh negara, demokrasi menjadi sebuah cara-menegara, kebangsaan yang tertuang dalam undang-undang yaitu kesatuan yang sudah ada yakni bangsa dan menjadi landasan negara, dan ketuhanan pun bagi Driyarkara perlu dilihat berbeda. Maka dari itu Pancasila menjadi prinsip menegara yang menjadi sarana untuk mencapai tujuan menegara itu sendiri.

Bagi Driyarkara dengan pemikiran Pancasila-nya, tujuan negara adalah *Kemakmuran Umum*. Jelaslah sudah apa yang dimaksud Driyarkara di sini yakni menegara adalah sebuah gotong royong<sup>2</sup> yang menghasilkan kesejahteraan umum. Hal lain yang perlu ditekankan menurut Driyarkara akan karya menegara adalah pengaturan Religi tidak masuk dalam karya menegara. Sudah jelas bahwa religi tidak dapat dipaksakan, bahkan oleh negara sekalipun, sebab Religi berdasarkan atas keyakinan dan keyakinan tidak dapat dipaksakan. Namun bukan berarti bahwa tidak ada hubungan sama sekali antara negara dan Religi. Negara diakui untuk menyelenggarakan syarat-syarat dan perlengkapan hidup untuk menciptakan kondisi yang baik bagi Religi. Driyarkara memandang hubungan antara negara dan Religi hendaknya simetris dan harus ada jarak antara keduanya. Maka dari itu negara Pancasila bukanlah negara Agama dan bukan pula negara profan.

Dari intisari pemikiran Driyarkara di atas, dapat dilihat bahwa Driyarkara pertanyaan yang diajukan mengenai Pancasila dan Religi terjawab sudah. Keduanya saling terkait.

## TENGGELAMNYA PANCASILA

Di awal saya sudah menyinggung mengenai fundamentalisme dan semangat sekular yang menjurus pada individualisme, narsisme dan hedonisme sebagai peregang dan penarik Pancasila sebagai dasar negara ini.

*Pertama*, fundamentalisme agama. Kasus Ahmadiyah menjadi contoh di mana fundamentalisme agama merasuk dalam sanubari beberapa kelompok fanatik di masyarakat saat ini. Aksi penolakan iman Ahmadiyah sebagai iman Islam sayangnya berujung pada tindak kekerasan. Korban dari aksi fisik tersebut tidaklah sedikit

jumlahnya. Bahkan, korban kasus penyerangan yang ditujukan kepada aliansi yang mendukung kebebasan beragama di Monas 1 Juni 2008<sup>3</sup> adalah kaum wanita dan anak-anak yang tidak bersenjata. Tindakan ini secara hakiki sudah menyalahi salah satu prinsip yang Driyarkara sebut sebagai Ada-bersama-dalam-cinta-kasih. Landasan titik pijak filosofis kritis menurut Driyarkara sudah ternoda. Dengan demikian, seluruh penalaran logis Driyarkara tentang perikemanusiaan, keadilan sosial, demokrasi, dan kebangsaan runtuh di hadapan kaum fundamentalis agama.

Persoalan menjadi semakin menarik lagi karena kaum fundamentalis justru mendasarkan dirinya pada ajaran agama. Padahal, agama itu sendiri merupakan institusionalisasi dari iman manusia kepada Allah. Iman kepada Allah, kepada Ada Yang Mutlak, Sang Maha Ada yang menjadi tolak ukur dan pegangan kaum fundamentalis justru mengalami pertentangan dengan paparan Driyarkara mengenai Pancasila. Eka sila Driyarkara yakni cinta kasih kepada Tuhan kehilangan gaung religinya lagi. Cinta kasih sebagai rumusan dasar eksistensi manusia sudah dicampakkan oleh manusia fundamentalis. Keberadaan bersama dengan yang lain menjadi omong kosong belaka bila kekerasan menjadi bahasanya. Tuhan yang diimani pun menjadi kabur karena cinta dan kebersamaan sebagai dimensi konstitutif manusia sudah tidak dihiraukan lagi. Persis pada titik inilah Pancasila seolah lenyap. Pancasila dilupakan.

Pancasila tenggelam; pernyataan ini terkait dengan muncul dan merebaknya budaya sekularistik di kalangan masyarakat Indonesia. Budaya sekular yang saya maksud disini adalah semangat individualisme, hedonisme, narsisisme dan kapitalisme. Manusia masa kini, seperti yang dikemukakan oleh Heidegger, sudah lupa akan Ada. Heidegger menangkap gejala zaman saat ini amat dipengaruhi oleh semangat kebendaan yang tinggi. Manusia lebih mementingkan nilai-nilai materi daripada nilai hidup (*values*). Kecenderungan ini pun merambah pada dunia pendidikan kita yang lebih mementingkan sisi intelektual dan kurang memperhatikan nilai-nilai moral.<sup>4</sup> Kepentingan material ini didukung oleh semangat untuk lebih mementingkan dirinya sendiri dari pada orang lain. Individualisme amat kental terlebih di dalam kehidupan masyarakat kota metropolitan. Narsisisme menggejala lantaran demi menunjukkan keberhasilan dan kesuksesannya, manusia-manusia kontemporer dengan berbagai cara ingin *show up*.<sup>5</sup> Budaya tampil menjadi populer di benak masyarakat. Level artifisial, apa yang nampak dan tidak mementingkan kualitas hidup, menjadi cita-cita cukup banyak orang dewasa ini. Semangat hedonisme rupanya juga mewabah di masyarakat. Kecenderungan untuk memilih yang enak, nyaman dan nikmat lebih dinomorsatukan daripada nilai kerja keras, gotong royong dan semangat pantang menyerah.<sup>6</sup> Semua gejala ini terangkum dalam semangat kapitalistik yang mulai semakin terasa selama sepuluh tahun terakhir ini. Bagaimana pekerja diposisikan sebagai modal dan alat produksi yang dapat diperjualbelikan muncul dalam sistem kontrak<sup>7</sup> yang diterapkan. Uang menjadi alat tukar yang diperebutkan. Dengan uang, segala hal dapat dengan mudah dilakukan di Indonesia ini. Alhasil, budaya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang selama periode

Orde Baru dipraktikkan secara tertutup, pada masa ini sudah menjadi cara berada masyarakat Indonesia pada umumnya. Sungguh, Indonesia ini mengaku dirinya masyarakat yang religius namun dalam prakteknya sangatlah kapitalis.

Berhadapan dengan semangat sekular di atas, pemikiran Driyarkara menunjukkan adanya “pelencengan” Pancasila sebagai *Weltanschauung*. Bahkan, tidak hanya “pelencengan” namun juga peniadaan atas filosofi hidup yang selama ini dihidupi dan diyakini sebagai Roh yang menggerakkan bangsa Indonesia. Mari kita lihat lagi peneropongan filosofis Driyarkara mengenai Pancasila. Keberadaan manusia sebagai kebersamaan digerogeti oleh semangat sekular tersebut. Kebersamaan dengan jiwa cinta kasih tak lagi dipandang sebagai sesuatu yang bernilai. Karena yang dicari adalah materi, kebersamaan merupakan sebuah topeng untuk meraup untung sebanyak-banyaknya. Cinta kasih hanya sebagai sarana untuk mencapai kepenuhan diri sendiri bukan untuk kesejahteraan bersama.

Lebih lanjut lagi, paham-paham sekular tersebut tidak cocok dengan jiwa keadilan sosial dan demokrasi. Kedua nilai hidup tersebut mau tak mau mengingatkan kita akan sebuah semangat yang sesungguhnya tak asing lagi di telinga masyarakat yakni gotong royong. Semangat ini berakar dari kebudayaan masyarakat Indonesia sendiri. Sayang sekali semangat ini mulai luntur akibat adanya kepentingan pribadi dan kelompok yang lebih diutamakan daripada kesejahteraan umum. Sepertinya masyarakat kita ini sudah bosan dengan Pancasila yang walaupun bernilai luhur namun dalam praktik penghayatannya masih nol besar. Koperasi yang menjadi bentuk perekonomian yang disetujui oleh *founding fathers* pada masa kini bergeser pada pola perekonomian yang lebih kapitalistik. Nilai-nilai kapitalistik bertentangan langsung dengan nilai-nilai Pancasila. Gotong royong *versus* kepentingan individu dan kelompok; kesejahteraan umum berhadapan dengan kehausan mereguk untung yang besar demi diri sendiri dan segelintir orang. Kembali pada level ini, Pancasila di mata masyarakat kontemporer menjadi sebuah pajangan indah akan nilai hidup yang menggantung jauh dari hati nurani manusia.

## MENGAJAR KEMBALI PADA PANCASILA

Setelah melihat pemikiran Driyarkara dan bagaimana tenggelamnya Pancasila dalam kehidupan kontemporer masyarakat dewasa ini, Driyarkara pada sebuah tulisannya berjudul “Kembali ke Pancasila” mengajak pembacanya untuk mengorientasikan dirinya kembali ke Pancasila. Ada beberapa hal yang Driyarkara berikan untuk kembali ke Pancasila dan catatan Driyarkara ini bersifat prinsipil.

*Pertama*, Driyarkara melihat adanya deviasi atau penyimpangan yang disebabkan karena kurangnya pengertian. Menurutnya, kita harus mengusahakan adanya penerangan tentang Pancasila. Ia menunjuk pada kegiatan seminar Pancasila yang membahas Pancasila dalam hubungannya atau perbandingannya dengan aliran pemikiran lain.

*Kedua*, Driyarkara menyarankan untuk masuk ke dalam dunia pendidikan.

Di matanya, perlu dibahas dan ditentukan mengenai cara penerapan Pancasila di dalam pendidikan generasi muda. Ia menunjuk Departemen Pendidikan sebagai pengemban tugas untuk ini. Saran Driyarkara inilah yang sampai saat ini belum menunjukkan hasil. Pendidikan P4 di mana setiap peserta didik diwajibkan untuk menghafal butir-butir Pancasila toh pada akhirnya hanya menghasilkan hafalan yang sudah dilupakan oleh banyak orang. Perlu dipikirkan lagi bagaimana mendidik generasi muda dengan semangat Pancasila, pendidikan yang tak hanya menanamkan nilai intelektualitas belaka namun juga nilai-nilai moral, pendidikan yang mengajak peserta didik untuk memeluk nilai Pancasila sebagai bagian dari hidupnya (internalisasi).

*Ketiga*, Driyarkara menyarankan penggunaan kebebasan pers, kebebasan mimbar, kritik dan sebagainya. Saat ini kebebasan pers sudah direngkuh oleh masyarakat. Tiap anggota masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk menyuarakan suaranya. Sayangnya, akhir-akhir ini topik mengenai Pancasila justru sangat jarang sekali dibahas oleh media massa. Bisa jadi tantangan kapitalisme yang menuntut persaingan antar media yang keras menuntut media untuk memuat berita yang terkini dan hangat.

Demikianlah tiga saran Driyarkara untuk mengangkat kembali Pancasila ke dalam posisinya sebagai dasar negara Indonesia dan sekaligus dasar dari mengada masyarakat Indonesia. Di akhir tulisan ini saya mengutip tulisan Driyarkara mengenai perjuangan terus menerus yang tak pernah berhenti untuk memeluk keutamaan Pancasila.

*“Satu hal yang harus kita kemukakan, kita jangan lupa bahwa Pancasila adalah **soal** perjuangan. Pancasila tidak kita warisi dari nenek moyang kita menurut hukum Mendel. Pancasila adalah **soal** keyakinan dan pendirian yang asasi. Pancasila tidak akan bisa tertanam dalam jiwa kita jika kita sendiri masing-masing tidak berjuang. Baik untuk masyarakat dan negara maupun untuk setiap individu, usaha penanaman Pancasila harus berjalan terus-menerus, tak ada bentinya. Tak seorang pun akan menjadi Pancasila-lais kalau dia tidak membuat dirinya Pancasila-lais. Negara kita tidak akan menjadi negara Pancasila jika kita tidak membuatnya terus-menerus.”<sup>8</sup>*

---

## Catatan Akhir

\* Mahasiswa Program Sarjana Filsafat STF Driyarkara.

<sup>1</sup> Perlu kita ingat, Bung Karno sebagai penggagas Pancasila memiliki sistematika urutan yang berbeda. Adapun Bung Karno mengurutkannya demikian: Kebangsaan Indonesia, Internasionalisme-Peri Kemanusiaan, Mufakat-Demokrasi, Kesejahteraan dan Ketuhanan. Lihat Bernhard Dahm, *Sukarno*

- and the Struggle for Indonesian Independence* (New York: Cornell University Press, 1969), 336-350.
- <sup>2</sup> Bung Karno berpendapat bahwa Pancasila bila dipadatkan akan menjadi satu sila yakni gotong royong. Dahm, *Sukarno and*, 859.
- <sup>3</sup> “Kebhinekaan Dicederai”, *KOMPAS*, 2 Juni 2008.
- <sup>4</sup> Gus Mus mengungkapkan hal ini dalam “Silaturahmi Kyai-Kyai Pesantren”, <http://www.gusmus.net/page.php?mod=dinamis&sub=11&cid=624&bulanku=3&tahunku=2010>.
- <sup>5</sup> Lihat dua artikel “Aku Mewah Maka Aku Ada” dan “Menikmati Hidup Sebagai Pengacara Bling”, *KOMPAS*, 31 Januari 2010.
- <sup>6</sup> Lihat dua artikel mengenai pembelian mobil dinas yang mewah bagi para pejabat negara. “Perkenalkan Mobil Dinas Menteri: Toyota Royal Crown Saloon”, <http://www.tempointeraktif.com/hg/proTOTYPE/2009/12/28/brk,20091228-215989.id.html> dan “Menteri Mulai Gunakan Mobil Dinas Baru”, <http://www.antara.co.id/berita/1262001713/menteri-mulai-gunakan-mobil-dinas-baru>.
- <sup>7</sup> Lihat UU 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- <sup>8</sup> Driyarkara, “Buku Keenam: Menalar Dasar Negara Indonesia” dalam *Karya Lengkap Driyarkara. Esai-esai Filsafat Pemikir yang Terlibat Penuh dalam Perjuangan Bangsaanya*, peny. A. Sudiarja, Budi Subanar, St. Sunardi, dan T. Sarkim Sudiarja (Jakarta: Gramedia, 2006), 880-881.

## DAFTAR PUSTAKA

- Driyarkara, N. 2006. “Buku Keenam: Menalar Dasar Negara Indonesia”, dalam *Karya Lengkap Driyarkara: Esai-esai Filsafat Pemikir yang Terlibat Penuh dalam Perjuangan Bangsaanya*, peny. A. Sudiarja, Budi Subanar, St. Sunardi, dan T. Sarkim, 831-881. Jakarta: Penerbit Kompas.
- SEMA-STF Driyarkara, peny. 1988. *Bunga Rampai Mengenang Prof. Dr. N. Driyarkara SJ dan Pemikiran Filosofisnya*. Jakarta: STF Driyarkara.
- Sutrisno, Mudji. 2000. *Driyarkara: Dialog-Dialog Panjang Bersama Penulis*. Jakarta: Obor.
- Sutrisno, Mudji. 2000. *Driyarkara: Filsuf yang Mengubah Indonesia*. Yogyakarta: Galang Press.